

**KAJIAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA
DALAM *TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP*
(TPP) PADA SEKTOR KESEHATAN
KHUSUSNYA PRODUKSI
TEMBAKAU/ROKOK**

Indonesian Conference on Tobacco or Health 2017
Balai Kartini, Jakarta 15–16 Mei 2017

PEMAKALAH



Ernawati Roeslie

**Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
Email ernawr@gmail.com**

Mukti Eka Rahadian

Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

Dwi Diyanti

Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

PENDAHULUAN

TPP (*Trans Pacific Partnership*)

Indonesia adalah *captive market* terbesar yang sangat menarik bagi para investor di bidang industri dan jasa kesehatan

Total ekspor Indonesia sebesar USD 2,9 Miliar apabila mengaksesi TPP atau akan terjadi potensi kehilangan USD 306 juta akibat pengalihan perdagangan jika memutuskan tidak bekerjasama dalam TPP

Tembakau komoditas ekonomi Indonesia dengan nilai ekspor yang akan meningkat ketika bergabung dengan TPP. Namun di samping keuntungan ekonomi yang didapat, juga terdapat dampak negatif terhadap produk hasil tembakau terlebih belum masuknya Indonesia dalam FCTC

Dampak kesehatan khususnya dari industri tembakau/rokok



METODE PENELITIAN

- ▶ **Narrative review mengenai dampak negative, kajian komoditas tembakau terkait kesehatan diambil dari berbagai sumber basis data: Peraturan Menteri Perindustrian; Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia; Atlas Tembakau Indonesia 2013; Atlas Tembakau Asean 2014; Riskesdas 2013, Kemenkes RI; Global Adult Tobacco Survey 2012; Jaminan Kesehatan Nasional; Kajian Makro Ekonomi, 2016; WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008; Tobacco Facts, Tobacco APHN, 2016**
- ▶ **Penelusuran dari online data base (Digital Object Identifier, BioMed Central, Science Direct, hyper.ahajournals.org).**
- ▶ **Strategi penelusuran data dilakukan dengan:**
 - ▶ **Mencari artikel terkait penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat rokok/produk tembakau. Kriteria inklusi**
 - ▶ **Pengecekan relevansi isi terhadap tujuan penelitian dan didapatkan 9 artikel**

ROADMAP PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU 2015-2020

Proyeksi (milyar batang)	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rokok Total	398,6	421,1	444,7	469,8	496,2	524,2
SKT (Sigaret Kretek Tangan)	77,0	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5
SKM (Sigaret Kretek Mesin) Mild	161,8	183,8	208,8	237,2	269,5	306,2
SKM (Sigaret Kretek Mesin) Reguler	117,2	122,6	128,4	134,4	140,7	147,3
SPM (Sigaret Putih Mesin)	22,2	23,2	24,2	25,3	26,5	27,7

- ▶ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-IND/PER/8/2015
- ▶ Pertumbuhan produksi rokok sebesar 5% - 7,4% per tahun
- ▶ Jumlah tersebut diperkirakan meningkat lagi sebesar 30% untuk tujuan ekspor (Kemenperin RI, 2015)

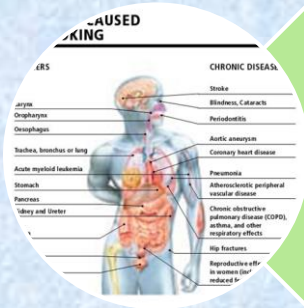
KOMODITAS TEMBAKAU DAN PENGARUH KESEHATAN

- ▶ **Tingginya keunggulan komparatif industri rokok, mendorong negara TPP menanamkan investasinya ke Indonesia**
- ▶ **Indonesia belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)**
- ▶ **Negara yang telah memiliki komitmen terhadap FCTC tidak dapat menjadi tujuan ekspor rokok termasuk negara-negara anggota TPP lainnya**
- ▶ **Harga rokok di Indonesia termasuk yang paling rendah di ASEAN sebesar USD 1,24 per bungkus**
- ▶ **Tahun 2013 hampir 80% produksi rokok dijual untuk konsumsi domestik (Kemenkeu RI, 2013)**
- ▶ **Supply tinggi akan menyebabkan harga rokok menjadi murah dan meningkatkan konsumsi rokok**
- ▶ **Peningkatan konsumsi rokok akan meningkatkan angka resiko kesakitan dan resiko kematian**
- ▶ **Perkiraan total kerugian ekonomi tahun 2013 akibat konsumsi rokok 378,75 triliun rupiah**
- ▶ **Nilai cukai rokok tahun 2013 sebesar 103,02 triliun rupiah, jauh lebih kecil dari total kerugian ekonomi**

KEBIJAKAN PERJANJIAN TPP DALAM KERANGKA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- ▶ Tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminaan kesehatan
- ▶ Potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional akibat perbedaan ideologi ekonomi liberal antara negara-negara yang tergabung dalam TPP dengan Indonesia
- ▶ Asuransi kesehatan standar TPP tidak dapat menyediakan paket manfaat yang telah diberikan oleh program JKN
- ▶ Masuknya investasi asing juga berpotensi meningkatkan kesenjangan standar pelayanan kesehatan karena penggunaan peralatan-peralatan canggih dan meningkatnya tarif pelayanan
- ▶ Secara umum Kebijakan Perjanjian TPP berpotensi tidak mendukung pencapaian sasaran Jaminan Kesehatan Nasional

KESIMPULAN



Konsumsi rokok mengakibatkan tingginya prevalensi angka kesakitan seperti penyakit kanker, hipertensi, jantung dan stroke. Angka kematian disebabkan oleh rokok juga meningkat.



Potensi dampak kesehatan dan ekonomi akibat produk hasil olahan tembakau (rokok) yang ikut meningkat dikarenakan Indonesia akan menjadi pasar komoditas rokok di antara negara TPP dikarenakan Indonesia belum masuk dalam FCTC, tidak sebagaimana ke 12 negara anggota TPP.



Jika Indonesia bergabung dengan TPP dan tidak melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian ekonomi akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok akan lebih tinggi dibandingkan dari sebelum bergabung dengan TPP (lebih dari 200 triliun).

REKOMENDASI

- ▶ **Penyesuaian kebijakan/peraturan yang tidak memberikan restriksi tapi menangkis agar dampak-dampak di atas dapat dicegah, misalnya penyamaan/penyesuaian cukai rokok sebagaimana di negara lain antar anggota TPP. Akses dalam FCTC merupakan langkah terbaik pemerintah dalam mencegah Indonesia sebagai pasar komoditas rokok dalam perdagangan antar negara TPP**
- ▶ **Kompensasi peningkatan anggaran kesehatan negara baik dari cukai tembakau dan pajak rokok seluruhnya, serta dari keuntungan pendapatan sektor selain kesehatan.**

SARAN

- ▶ TPP harus dapat memberi ruang kepada pemerintah untuk mengatur kesehatan yang menjadi hak rakyat.
- ▶ Advokasi yang dilakukan oleh organisasi profesi kesehatan dan para aktivis pengendalian tembakau.
- ▶ TPP harus dapat memberi ruang kepada pemerintah untuk mengatur kesehatan yang menjadi hak rakyat.
- ▶ Negara harus mampu menjamin pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyatnya.
- ▶ Regulasi domestik harus dijaga dalam kerangka stabilitas politik, sosial, dan ekonomi kesehatan serta kedaulatan NKRI.
- ▶ Perbedaan prinsip dan ideologi ekonomi kesehatan di Indonesia dengan prinsip ekonomi liberal, harus mengundang *public health awareness* terhadap ketidakterbukaan negosiasi antar negara TPP.

THANK **YOU**

